



IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Aisyah¹, Arif Budiman², Saidah Hasbiyah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : aiaisahh0910@gmail.com

ABSTRAK

Sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) adalah suatu program nasional di bidang sanitasi yang mencakup lima pilar utama, yaitu menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan (SBABS), mencuci tangan dengan sabun, pengelolaan air minum dan makanan di rumah tangga (PAMM-RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Fenomena yang terjadi mencakup tidak optimalnya penggunaan fasilitas WC sehat yang disediakan pemerintah, kurangnya pengelolaan infrastruktur STBM, minimnya sosialisasi tentang pemilahan sampah organik dan anorganik, serta kurangnya pengelolaan limbah cair rumah tangga menyebabkan pembuangan sembarangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi program STBM di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Deskriptif) dengan sumber data dari teknik *Snowball Sampling* yang melibatkan 13 informan. Data dianalisis melalui kondensasi, penyajian, dan kesimpulan. Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, ketekunan, triangulasi, bahan referensi, dan verifikasi informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program STBM di Desa Sungai Pinang cukup baik, dengan indikator pencapaian, sumber daya manusia, finansial, sarana-prasarana, organisasi formal, sikap kecenderungan sikap menerima/menolak, kondisi ekonomi, dan politik, sementara kurang baik meliputi ketepatan sasaran kebijakan, target, SOP, organisasi informal, konsisten, sosialisasi, dan kondisi sosial masih perlu peningkatan. Kemudian sudah baik meliputi pemahaman pelaksanaan kebijakan, komunikasi dengan instansi lain. Faktor-faktor pendukung meliputi sumber daya pelaksana, tingkat perubahan yang signifikan sedangkan faktor faktor penghambat meliputi sulitnya merubah perilaku manusia, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, dan tidak ada penegakkan sanksi yang tegas. Untuk peneliti memberikan saran kepada semua agen pelaksana yang bertanggung jawab supaya lebih memperhatikan lagi dukungan lingkungan sosial masyarakat, baik dari tingkat kesadaran, partisipasi dan keikutsertaan berperan dalam pelaksanaan suatu pertemuan dan mengontrol perilaku-perilaku masyarakat agar tidak lagi menggunakan jamban di sungai, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air bersih, melakukan pemilahan sampah, dan membuang limbah cair rumah tangga pada tempatnya.

Kata kunci: Implementasi, Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

ABSTRACT

Community-based total sanitation (STBM) is a national program in the field of sanitation that includes five main pillars, namely stopping open defecation (SBABS), washing hands with soap, managing drinking water and food in the household (PAMM-RT), household waste management, and household liquid waste management. The phenomena that occur include non-optimal use of sanitary toilet facilities provided by the government, lack of management of STBM infrastructure, lack of socialization about sorting organic and inorganic waste, and lack of management of household liquid waste which causes careless disposal. This research aims to explore how the



STBM program is implemented in Sungai Pinang Village, Sungai Pandan District, Hulu Sungai Utara Regency, along with the factors that influence it. This research uses a qualitative (descriptive) approach with data sources from the Snowball Sampling technique involving 13 informants. Data is analyzed through condensation, presentation and conclusion. The data credibility test was carried out by extending observation, persistence, triangulation, reference materials, and informant verification. The results of the research show that the implementation of the STBM Program in Sungai Pinang Village is quite good, with indicators of achievement, human resources, finance, facilities and infrastructure, formal organization, attitudes towards the program, economic and political conditions considered good, while targets, SOPs, informal organizations, and social conditions still need improvement. Then things that are not good include the accuracy of policy targets, consistency, socialization. Furthermore, what is good includes understanding policy implementation, communication with other agencies. Supporting factors include implementation resources, a significant level of change, while inhibiting factors include the difficulty of changing human behavior, low levels of public awareness, and the absence of strict enforcement of sanctions. For researchers to provide advice to all implementing agents who are responsible for paying more attention to the support of the social environment of the community, both from the level of awareness, participation and involvement in holding a meeting and controlling community behavior so that they no longer use toilets in rivers, wash their hands thoroughly. soap, using clean water, sorting waste, and disposing of household liquid waste in its proper place.

Keywords: *Implementation, Community Based Total Sanitation Program (STBM)*

PENDAHULUAN

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) berarti sebagian upaya pemerintah di bidang sanitasi melibatkan berbagai sektor. Menteri Kesehatan Republik Indonesia memperkenalkan program ini. STBM merupakan pendekatan yang bertujuan merubah sikap terkait kesehatan lingkungan hidup dengan partisipasi aktif masyarakat, dengan menggunakan metode pemicuannya. Dalam startegi yang disusun oleh Kementerian kesehatan, pembangunan kesehatan ditetapkan sebagai prioritas. STBM merupakan startegi yang diterapkan untuk memperbaiki perilaku sanitasi dan kebersihan dengan melibatkan masyarakat dan menerapkan pendekatan pemicuan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat sering kali menjadi penyebab munculnya masalah kesehatan lingkungan. Penyakit pada dasarnya timbul karena adanya interaksi kompleks antara beragam elemen di lingkungan yang saling mempengaruhi. Aspek-aspek ini berkontribusi terhadap risiko kematian atau perkembangan penyakit akibat lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang hubungan antara berbagai jenis lingkungan menjadi sulit untuk mengatasi masalah lingkungan secara holistik dan menyeluruh.

Pemerintah berusaha mengatasi hal ini melalui keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Startegi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang kemudian diperkuat oleh penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) setelah empat tahun berjalan.

STBM merupakan strategi dengan lima pilar utama yang meliputi lima aspek kunci, yakni: Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS), Mencuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMM-RT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga. Dalam hasil observasi.



Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis diketahui adanya permasalahan yang muncul pada Sungai Pinang Kecamatan Muara Sungai Pandan diantaranya:

1. Fasilitas berupa WC sehat yang disediakan pemerintah tidak digunakan semestinya. Meskipun telah ada fasilitas WC yang memadai, sebagaimana masyarakat masih memilih untuk buang air besar di jamban, hal ini dilihat jumlah jamban yang ada di bantaran sungai ada 17 buah.
2. Kurang terkelolanya infrastruktur sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dalam lima pilar dengan baik.
3. Minimnya sosialisasi menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pemilahan sampah organik dan anorganik serta dampak terhadap lingkungan sekitar, hal ini dikarenakan sosialisasi hanya dilakukan pada tahun 2017.
4. Tidak adanya pengelolaan limbah cair rumah tangga yang mengakibatkan pembuangan limbah secara semabrangan

Menurut Wahab dalam Anggara (2016), implementasi kebijakan merupakan proses dimana keputusan kebijakan yang sering kali berupa undang,undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden, dijalankan.

Menurut pandangan Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Affrian (2023) implementasi kebijakan dipengaruhi 6 variabel, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Penilaian dalam kinerja suatu implementasi tentang kebijakan dapat menggunakan indikator keberhasilan, asalkan tujuan dan standar kebijakan tersebut sesuai dengan realitas sosial dan budaya pada tingkat implementasi. Jika tujuan atau standar kebijakan tidak realistis bagi masyarakat yang terlibat, maka implementasi kebijakan tersebut akan menghadapi kesulitan dalam mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan.

2. Sumber daya

Kompetensi dalam menggunakan sumber daya tersedia dengan peran krusial dalam penentuan kesuksesan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, bahwa manusia dianggap sebagai suatu sumber daya paling krusial untuk menentukan berhasilnya suatu implementasi tersebut. Beberapa tahap dalam proses implementasi menekankan pentingnya memiliki tenaga kerja yang sesuai kualitas pekerjaan dalam tuntutan yang diamanahkan dalam kenijakan dan ditetapkan oleh politis. Oleh karena itu, kecukupan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia dapat memiliki dampak signifikan terhadap kinerja kebijakan publik.

3. Karakteristik agen pelaksana

Fokus utama ditempatkan kepada para pelaku kebijakan, baik di dalam struktur organisasi formal maupun informal. Hal ini penting karena kesesuaian karakteristik para pelaksana dengan tugas mereka memiliki dampak besar terhadap efektivitas implementasi kebijakan publik. Sebagai contoh jika tujuan ketertiban umum adalah mengubah perilaku masyarakat secara radikal maka aparat penegak hukum yang ditunjuk harus tegas dan mengikuti aturan dan sanksi yang diberikan undang-undang. Namun, jika kebijakan publik tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan dalam mengubah perilaku dasar manusia, para pelaksana dapat dianggap kurang keras dan tegas seperti contoh sebelumnya.

4. Sikap/kecenderungan (*Dispostion*) para pelaksana

Penerimaan atau penolakan dari pelaksana memiliki dampak yang penting terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini sering terjadi karena kebijakan yang diterapkan mungkin tidak berasal dari pemahaman mendalam tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Sebaliknya, kebijakan sering kali ditetapkan oleh pihak tingkat atas yang mungkin tidak memahami atau bahkan tidak mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, atau masalah yang ingin diatasi oleh masyarakat.

5. Komunikasi antarorganisasi terkait

Koordinasi dan komunikasi yang efektif di antara semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik merupakan sarana yang efektif, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan, begitu juga sebaliknya.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Menurut pandangan yang diusulkan oleh Van Meter dan Van Horn, evaluasi kinerja implementasi kebijakan publik mencakup sejauh mana dukungan dari lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketika lingkungan sosial, ekonomi, dan politik tidak mendukung, hal tersebut dapat menjadi penyebab kegagalan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, dalam usaha untuk melaksanakan kebijakan, penting untuk memperhitungkan perhatian terhadap kondisi lingkungan eksternal yang mendukung.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara".

METODE

Tempat penelitian ini dilakukan pada Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kode Pos 71455. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menginvestigasi kondisi alamiah objek penelitian (natural setting) dan mengumpulkan data yang bersifat kualitatif, berbeda dengan pendekatan eksperimen. Menurut Sugiyono dalam buku Pasolong (2016) penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang diamati. Proses penelitian melibatkan langkah-langkah deskripsi, pencatatan, analisis, dan interpretasi terhadap kondisi yang sedang berlangsung.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder untuk memastikan hasil penelitian yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik penarikan informan yang digunakan adalah *Snowball Sampling*. Sedangkan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman and Saldana, 2014). Sedangkan uji kredibilitas data terdiri dari perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisa pada kasus negatif, menggunakan bahan referensi, melakukan member check.

PEMBAHASAN

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

a. Ketepatan Sasaran Kebijakan

Ketepatan Sasaran kebijakan harus jelas dan spesifik. Kejelasan ini penting agar semua pihak yang terlibat dalam program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang harus



dicapai sehingga tidak menyebabkan interpretasi yang berbeda beda, sehingga menghambat proses implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disimpulkan ketepatan sasaran kebijakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) kurang baik, karena masih kurang diketahui secara keseluruhan dan rinci oleh pelaku kebijakan dan masyarakat di desa Sungai Pinang, hal tersebut dikarenakan tidak adanya informasi secara khusus untuk mendalami tentang sanitasi total mencakup lima pilar STBM.

b. Target

Target merupakan standar atau tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Target digunakan sebagai panduan untuk mengarahkan usaha dan sumber daya, serta sebagai tolok ukur untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti menyimpulkan mengenai target kurang baik, karena dalam program sanitasi mencakup lima pilar masih adanya jamban di sungai yang membuat masyarakat BABS, mandi, cuci,kakus di sungai, pemilahan sampah yang belum baik dikelola, dan belum tersedianya septic tank untuk limbah cair rumah tangga.

c. Pencapaian

Pencapaian adalah hasil atau tingkat keberhasilan yang diperoleh setelah melaksanakan program atau kebijakan. Pencapaian mencerminkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat terpenuhi dan dievaluasi berdasarkan hasil aktual yang dibandingkan dengan target tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara,observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pencapaian dalam implementasi program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) cukup baik, hal ini dapat dilihat dari lima pilar yang dapat dilaksanakan empat tetapi masih perlu perbaikan dalam penerapan STBM dalam kehidupan sehari-hari.

d. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para agen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. SOP memiliki kegunaan untuk sebuah birokrasi dalam implementasi kebijakan dengan prosedur perencanaan yang fleksibel dapat beradaptasi terhadap tanggung jawab baru dari pada birokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan standar operasional prosedur (SOP) kurang baik, karena tidak ada mekanisme baku dalam penerapan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tahap tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang di isyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik, tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil,maka kinerja kebijakan sangat sulit untuk diharapkan, indikator untuk sumber daya, yaitu terdiri:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)



di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia cukup baik, karena sumber daya pelaksana seperti pihak pelaksana sudah mendukung, tetapi dalam penerapan kepada masyarakat masih sebgaiian karena masih terdapat bangunan jamban di sungai, tidak dipilahnya sampah, pengelolaan limbah cair rumah tangga dibuang sembarangan.

b. Sumber daya finansial

Sumber daya non manusia sangat penting untuk mendukung proses terlaksananya implementasi kebijakan, seperti finansial berupa dana untuk mengrealisasikan tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara,observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan sudah baik, karena pemerintah desa sudah melakukan penganggaran untuk pembangunan WC ke masyarakat dengan cara memberikan jamban sehat, memberikan tempat cuci tangan, pembangunan tong pamsimas untuk menyediakan air bersih, dan tempat bak sampah.

c. Sarana dan Prasarana

seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut merupakan alat pembantu maupun alat utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Keberhasilan proses implementasi kebijakan dapat tercapai dengan baik apabila sarana dan prasarana yang disediakan sudah memadai.

Berdasarkan hasil wawancara,obervasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan cukup baik, karena pemerintah desa menyediakan WC sehat bagi masyarakat namun dalam penerapannya masih ada warga yang melakukan aktivitas MCK di sungai. Tempat cuci tangan yang diberikan oleh pemerintah sudah tidak terlihat lagi di sekitar rumah, pembangunan tong pamsimas hanya ada di Rt 1 dan 2, sedangkan Rt 3,4, dan 5 belum memiliki, belum adanya sarana untuk pembuangan limbah cair rumah tangga.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah di tetapkan indikator untuk karakteristik agen pelaksana.

a. Organisasi formal

Kumpulan dari dua orang atau lebih yang megikat diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Tingkat organisasi pemerintahan memiliki peran yang sama pentingnya dan secara organisasi yang siap harus bekerja sama dalam suatu kebijakan yang dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan cukup baik, karena ada keterlibatan organisasi formal dari pihak-pihak pemerintah, yaitu dinas kesehatan,dinas PU, dinas pemberdayaan masyarakat yang sudah membentuk forum pokja (kelompok kerja). Namun di desa Sungai Pinang tidak ada pembentukan organisasi foral hanya melibatkan pemerintah desa dan masyarakat.



b. Organisasi informal

Kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Tingkat organisasi pemerintahan memiliki peran yang sama pentingnya dan organisasi yang siap harus bekerja sama dalam suatu kebijakan yang dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi disimpulkan bahwa kurang baik, karena tidak ada keterlibatan organisasi informal di desa Sungai Pinang hanya melibatkan para pemuda untuk membantu pelaksanaan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

4. Sikap/Kecendurungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengalami (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. Indikator untuk sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana.

a. Pemahaman pelaksana terhadap kebijakan

Para agen pelaksana implementasi kebijakan perlu memiliki pemahaman dan pengertian terhadap kebijakan. Dengan adanya hal ini sejauh mana implementor melaksanakan kebijakan dalam implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Sungai Pinang.

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan sudah baik, karena para pelaksana sudah memahami dan menjalankan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di desa Sungai Pinang.

b. Sikap menerima/menolak

Apabila pelaksana bisa mengarahkan maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan bagus serta adanya keterlibatan dari tokoh masyarakat dalam memberikan pandangan dan motivasi, namun tidak semua masyarakat yang ikut terlibat benar benar melaksanakan kebijakan dengan baik.

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti disimpulkan bahwa cukup baik, karena pelaksana menerima terlaksananya program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), tetapi partisipasi dari masyarakat hanya sebagian.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan dimana mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

a. Komunikasi dengan instansi lain

Dukungan instansi lain merupakan metode dalam salah satu penguatan aktivitas dalam proses implementasi kebijakan. Semakin banyak dukungan dari instansi-intansi lain maka



akan semakin mudah dan lancer proses Impelemntasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Desa Sungai Pinang.

Berdasarkan wawancara dan observasi disimpulkan sudah baik, karena adanya dukungan dari instansi di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada desa Sungai Pinang yang mana dukungannya dalam perubahan perilaku ataupun pembiayaan untuk pembangunan WC sehat, pembangunan tong pamsimas, penyediaan tempat sampah, sehingga dapat memudahkan dalam proses pelaksanaan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

b. Konsisten

Konsisten menunjukkan sejauh mana sebuah organisasi publik dapat memastikan bahwa Keputusan dan Tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan prinsip kebijakan yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara,observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan terkait konsisten kurang baik, karena pemerintah desa melakukan penyampaian kepada masyarakat hanya satu kali dalam setahun dalam acara rembuk stunting.

c. Sosialisasi

Sosialisasi membantu individu atau organisasi baru untuk beradaptasi dengan tata nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan kerja, membangun identitas dan kesetiaan terhadap organisasi, serta mentransfer nilai nilai dan norma norma organisasi kepada anggota baru untuk menciptakan keselarasan dalam pemahaman dan perilaku dalam organisasi.Berdasarkan wawancara dan observasi disimpulkan bahwa kurang baik, karena sosialisasi yang dilakukan pihak dinas kesehatan, puskesmas hanya dilakukan dulu pada tahun 2017 dan sekarang tidak pernah dilakukan sosialisasi di desa Sungai Pinang.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam presepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan politik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.. Oleh sebab itu, Upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Indikator untuk lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, yaitu terdiri dari:

a. Kondisi Ekonomi

Upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan, salah satunya yaitu lingkungan ekonomi. Karena kondisi ekonomi memiliki pengaruh atau dampak yang kuat terhadap kelancaran pelaksanaan suatu program, keadaan tersebut dapat menimbulkan manfaat ataupun kerugian pada pelaksanaan kebijakan.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan terkait lingkungan ekonomi cukup baik, karena rata rata masyarakat desa Sungai Pinang kondisi ekonominya menengah ke bawah dengan mayoritas masyarakat sebagai petani.

b. Kondisi Sosial

Kondisi sosial menjadi faktor penentu terhadap perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada setiap individu ataupun kelompok. Lingkungan sosial memiliki peranan sesuai



dengan keadaan lingkungan apakah keberadaan Masyarakat dan keadaan lingkungan sudah sesuai.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial kurang baik, karena sebagian masyarakat desa Sungai Pinang masih merasa nyaman untuk BAB di sungai, masyarakat belum terbiasa memilah sampah sebelum membuangnya, kebiasaan membuang limbah cair sembarangan.

c. Kondisi politik

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, instansi pemerintah dan kelompok yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan individu dalam suatu Masyarakat tertentu.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan terkait kondisi politik cukup baik, karena pemerintah mendukung adanya program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) baik dari pihak dinas kesehatan ataupun puskesmas tetapi pemerintah hanya melakukan penghimbau kepada masyarakat.

Faktor penghambat dalam Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara ada 3 yaitu:

1. Sulitnya Merubah Perilaku manusia

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan masih sulit merubah perilaku masyarakat karena masing masing masyarakat mempunyai kebiasaan yang berbeda- beda.

2. Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat yang tidak mau berubah perilaku, hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program.

3. Tidak Ada Penegakkan Sanksi yang Tegas

Hasil wawancara dan observasi disimpulkan bahwa tidak ada penegakkan sanksi yang tegas dalam pengimplementasian program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di desa Sungai Pinang.

Faktor pendukung dalam Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ada 2 yaitu:

1. Sumber Daya Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dikatakan adanya peran penting dari sumber daya pelaksana yang bertanggung jawab mengarahkan dan sumber daya manusia yang mau berubah demi tercapainya tujuan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

2. Tingkat Perubahan yang Signifikan

Hasil wawancara dan observasi disimpulkan bahwa tingkat perubahan perilaku masyarakat sudah ada mengalami perubahan di Desa Sungai Pinang dalam melaksanakan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

SIMPULAN

Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari

indikator cukup baik yaitu indikator pencapaian cukup baik dari lima pilar yang dapat dilaksanakan empat tetapi masih perlu perbaikan dalam penerapan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), indikator sumber daya manusia cukup baik karena sumber daya pelaksana seperti pihak dinas kesehatan, puskesmas, pemerintah desa, kader desa mendukung program STBM meskipun dalam penerapan kepada masyarakat masih sebagian, indikator sumber daya finansial cukup baik pemerintah desa sudah melakukan penganggaran untuk pembangunan WC kemasyarakatan, memberikan tempat cuci tangan, tong pamsimas, dan bak sampah. Walaupun pembangunan sarana dalam pengelolaan limbah cair rumah tangga terkendala dalam penyaluran limbah cair yang tempatnya tidak memungkinkan dan penggunaan dana desa yang dilakukan bertahap, indikator sarana dan prasarana cukup baik pemerintah desa sudah menyediakan WC bagi masyarakat namun dalam penerapannya masih ada warga melakukan aktivitas MCK di sungai, tempat cuci tangan yang diberikan oleh pemerintah sudah tidak terlihat lagi, pembangunan tong pamsimas hanya ada di RT 1 dan 2, belum ada sarana sarana pembuangan limbah cair rumah tangga. Pada indikator organisasi formal cukup baik karena keterlibatan organisasi formal dari pihak pemerintah namun desa Sungai Pinang tidak ada pembentukan hanya melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Indikator sikap menerima/menolak cukup baik karena pelaksana menerima terlaksananya program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). selanjutnya indikator kondisi ekonomi cukup baik karena rata rata masyarakat desa Sungai Pinang kondisi ekonominya menengah kebawah bekerja sebagai petani. Pada indikator kondisi politik cukup baik pemerintah mendukung adanya program STBM tetapi hanya melakukan penghimbau kepada masyarakat. Sedangkan kurang baik yaitu pada ukuran dan tujuan kebijakan dalam indikator ketepatan sasaran kebijakan masih kurang baik karena kurang diketahui secara keseluruhan, indikator target kurang sesuai target disebabkan masih adanya jamban di sungai, pemilahan sampah yang belum baik dikelola, dan belum tersedianya septic tank untuk limbah cair rumah tangga, indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) kurang baik karena tidak ada mekanisme baku dalam penerapan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Karakteristik agen pelaksana pada indikator organisasi informal kurang baik karena tidak ada keterlibatan organisasi informal hanya melibatkan para masyarakat dan pemuda untuk membantu pelaksanaan program STBM, indikator konsisten kurang baik karena pemerintah desa melakukan penyampaian kepada masyarakat hanya satu kali dalam setahun, indikator sosialisasi kurang baik karena tidak pernah dilakukan lagi sosialisasi di Desa Sungai Pinang. Pada variabel Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam indikator kondisi sosial kurang baik sebagian besar masyarakat masih merasa nyaman untuk BAB di sungai, belum terbiasa memilah sampah sebelum membuangnya, kebiasaan membuang limbah cair rumah tangga sembarangan. Berikutnya indikator sudah baik yaitu pada indikator pemahaman pelaksanaan kebijakan para pelaksana sudah memahami dan menjalankan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), indikator komunikasi dengan instansi lain sudah baik pelaksana menerima terlaksananya program STBM.

Faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai terbagi menjadi dua, *Pertama*, faktor pendukung yaitu sumber daya pelaksana dan tingkat perubahan yang signifikan. *Kedua*, faktor penghambat meliputi sulitnya merubah perilaku manusia, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, dan tidak ada penegakkan sanksi yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.



Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anggara, S. (2016) *Ilmu Administrasi Negara*. 2nd edn. Bandung: CV Pustaka Setia.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. (2014) *Qualitative data analysis: data source book, Third Edition*. 3rd edn. America: SAGE Publications, Inc.

Pasolong, H. (2016) *Metode Penelitian Admintrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.



Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.